

Tren Pelaksanaan Administrasi Kurikulum pada Satuan Pendidikan

Naila Amelia^{1*}

¹ Departemen PG PAUD, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Dikirim pada tanggal 31 Januari 2026

Direvisi pada tanggal 7 Maret 2026

Diterima pada tanggal 25 April 2026

Terbit online pada tanggal 30 April 2026

Kata kunci:

Implementasi, Administrasi, Kurikulum



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Administrasi kurikulum merupakan aspek krusial dalam pengelolaan pendidikan yang menentukan efektivitas pembelajaran di satuan pendidikan. Artikel ini mengkaji tren pelaksanaan administrasi kurikulum pada satuan pendidikan dalam konteks transformasi pendidikan Indonesia, khususnya perubahan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka dan tantangan era Society 5.0. Kajian literatur ini menganalisis bagaimana administrasi kurikulum berkembang dari pengelolaan dokumen administratif konvensional menjadi sistem yang lebih fleksibel, adaptif, dan berbasis teknologi. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi kurikulum terkini menuntut pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi pengelolaan, otonomi yang lebih luas bagi satuan pendidikan, serta peran strategis kepala sekolah dan pendidik dalam perencanaan, pengorganisasian, dan supervisi kurikulum. Transformasi ini juga mengharuskan integrasi nilai-nilai karakter dengan kompetensi abad 21, termasuk keterampilan berpikir kritis kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi.

Penulis Korespondensi:

Naila Amelia

Email: melianaila0309@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Administrasi kurikulum merupakan salah satu aspek krusial dalam pengelolaan pendidikan yang menentukan efektivitas proses pembelajaran di satuan pendidikan. Dalam konteks pendidikan modern, administrasi kurikulum tidak hanya sebatas pengelolaan dokumen administratif, melainkan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh komponen kurikulum yang diterapkan. Konsep administrasi kurikulum telah berkembang sejalan dengan perubahan paradigma pendidikan dari teacher-centered learning menuju student-centered learning, yang menuntut pendekatan administratif yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kajian teoritis mengenai administrasi kurikulum menjadi penting untuk memahami bagaimana pengelolaan kurikulum yang efektif dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Kurikulum merupakan jantung dari sistem pendidikan yang menentukan arah dan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Sepanjang sejarah pendidikan Indonesia, kurikulum telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan tuntutan perkembangan masyarakat. Febriyenti, Putri, Asmendri, dan Sari (2023) mencatat bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia dalam perspektif sejarah menunjukkan adanya dinamika yang terus-menerus dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Perubahan kurikulum ini tidak hanya menyangkut aspek konten pembelajaran, tetapi juga mencakup sistem administrasi dan pengelolaan kurikulum yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.

Transformasi kurikulum terkini di Indonesia ditandai dengan perubahan dari Kurikulum 2013 (K-13) menjadi Kurikulum Merdeka, yang membawa paradigma baru dalam administrasi kurikulum di satuan pendidikan. Firmansyah dkk. (2023) mengungkapkan bahwa proses perubahan kurikulum K-13 menjadi Kurikulum Merdeka memberikan otonomi yang lebih luas kepada satuan pendidikan dalam

mengembangkan dan mengelola kurikulum operasionalnya. Perubahan ini menuntut kemampuan administratif yang lebih adaptif dan inovatif dari para administrator dan pendidik di sekolah. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh Kurikulum Merdeka mengharuskan satuan pendidikan untuk memiliki sistem administrasi kurikulum yang terstruktur dan efektif agar dapat memanfaatkan otonomi tersebut secara optimal.

Dalam konteks perkembangan era Society 5.0, tuntutan terhadap kompetensi dan sistem administrasi kurikulum semakin kompleks. Sumantri (2022) menekankan bahwa pengembangan kurikulum di Indonesia harus mampu menghadapi tuntutan kompetensi dalam perkembangan era Society 5.0, di mana integrasi teknologi digital, kecerdasan buatan, dan big data menjadi bagian integral dari proses pendidikan. Kondisi ini menuntut sistem administrasi kurikulum yang tidak hanya berbasis pada dokumen fisik, tetapi juga memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kurikulum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi program pembelajaran.

Revolusi industri 4.0 juga memberikan dampak signifikan terhadap bagaimana administrasi kurikulum dilaksanakan di satuan pendidikan. Darise (2019) menjelaskan bahwa implementasi Kurikulum 2013 Revisi dapat menjadi solusi alternatif pendidikan di Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0, namun hal ini memerlukan sistem administrasi yang mampu mengintegrasikan kompetensi abad 21 dengan kebutuhan industri masa depan. Administrasi kurikulum yang efektif harus mampu memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi, serta mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran.

Peran kepala sekolah dan pendidik dalam administrasi kurikulum menjadi semakin krusial dalam konteks transformasi pendidikan saat ini. Nurwatin (2022) menemukan bahwa pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar dan kesiapan kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap penyesuaian pembelajaran di sekolah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kapasitas kepala sekolah dalam mengelola administrasi kurikulum, termasuk kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan supervisi pelaksanaan kurikulum, menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan profesional guru dan inovasi pembelajaran.

Pendidik sebagai garda terdepan dalam implementasi kurikulum juga memiliki peran vital dalam proses administrasi kurikulum. Patimah (2016) menegaskan bahwa pendidik memiliki tanggung jawab penting dalam pengembangan kurikulum, tidak hanya sebagai pelaksana kurikulum tetapi juga sebagai pengembang kurikulum di tingkat kelas. Dalam konteks administrasi kurikulum, guru terlibat dalam proses penyusunan program pembelajaran, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Kemampuan guru dalam mengelola aspek administratif pembelajaran, termasuk dokumentasi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, menjadi indikator penting dari kualitas administrasi kurikulum di satuan pendidikan.

Integrasi nilai-nilai dalam kurikulum juga menjadi pertimbangan penting dalam administrasi kurikulum di Indonesia. Rifa'i (2016) membahas implementasi pembelajaran integrated antara Imtaq (Iman dan Takwa) dan Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), yang menunjukkan bahwa administrasi kurikulum harus mampu mengakomodasi pengintegrasian nilai-nilai keagamaan dengan penguasaan sains dan teknologi. Hal ini menuntut sistem administrasi kurikulum yang holistik dan komprehensif, yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif tetapi juga pengembangan karakter dan spiritual peserta didik.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang tren pelaksanaan administrasi kurikulum pada satuan pendidikan menjadi sangat relevan dan penting. Meskipun berbagai studi telah mengkaji aspek-aspek transformasi kurikulum, perubahan paradigma pembelajaran, dan kesiapan stakeholder pendidikan, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana satuan pendidikan secara konkret melaksanakan administrasi kurikulum dalam konteks transformasi kurikulum nasional dan tantangan digitalisasi pendidikan. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi tren pelaksanaan administrasi kurikulum, menganalisis praktik-praktik terbaik yang diterapkan oleh satuan pendidikan, serta merumuskan rekomendasi untuk peningkatan kualitas administrasi kurikulum yang dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional di era Society 5.0.

2. KAJIAN TEORI

Administrasi kurikulum merupakan fondasi manajerial yang menentukan keberhasilan sistem pendidikan melalui rangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi seluruh komponen pembelajaran. Secara konseptual, administrasi ini telah bertransformasi dari sekadar pengelolaan dokumen administratif menjadi pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, seiring dengan pergeseran paradigma menuju student-centered learning. Landasan teoritis ini menjadi krusial untuk memahami bagaimana tata kelola kurikulum yang efektif dapat secara langsung meningkatkan

kualitas pembelajaran serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam struktur pendidikan, kurikulum berfungsi sebagai "jantung" yang mengarahkan kualitas instruksional, sehingga setiap dinamika perubahannya selalu menuntut penyesuaian sistem administrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks perkembangan di Indonesia, dinamika kurikulum senantiasa bergerak secara historis untuk menyempurnakan kualitas pendidikan nasional. Transformasi signifikan saat ini terlihat pada peralihan dari Kurikulum 2013 (K-13) menuju Kurikulum Merdeka, yang memberikan otonomi lebih luas kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasionalnya. Otonomi ini menuntut kapasitas administratif yang inovatif dari kepala sekolah dan pendidik agar fleksibilitas yang ditawarkan dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, tantangan global seperti Revolusi Industri

4.0 dan era Society 5.0 mengharuskan administrasi kurikulum mengintegrasikan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan big data. Oleh karena itu, sistem administrasi modern tidak lagi cukup berbasis dokumen fisik, melainkan harus bertransformasi menjadi sistem berbasis teknologi informasi yang mampu memfasilitasi keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi.

Keberhasilan implementasi tren administrasi ini sangat bergantung pada peran strategis kepala sekolah dan pendidik. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan supervisi, di mana kesiapan mereka berpengaruh signifikan terhadap penyesuaian pembelajaran di sekolah. Di sisi lain, pendidik bertindak sebagai pengembang kurikulum di tingkat kelas yang mengelola dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berkelanjutan. Selain aspek teknis dan digital, administrasi kurikulum di Indonesia juga harus mampu mengakomodasi nilai-nilai holistik, seperti pengintegrasian Iman dan Takwa (Imtaq) dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Sintesis dari berbagai teori dan temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan kurikulum telah memberikan ruang otonomi dan digitalisasi, masih diperlukan kajian lebih mendalam mengenai praktik konkret pelaksanaan administrasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan guna menutup kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas di lapangan.

3. METODE, DATA, ANALISIS

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (literature review) untuk mengkaji tren pelaksanaan administrasi kurikulum pada satuan pendidikan. Fokus utama penelitian adalah mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyimpulkan hasil penelitian terdahulu guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika administrasi kurikulum di Indonesia.

Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder yang berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan pendidikan terkait. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data akademik dengan fokus pada publikasi mutakhir dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir untuk menjaga relevansi informasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) terhadap literatur yang telah dikumpulkan. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai temuan, mengidentifikasi pola atau tren yang muncul, serta menemukan kesenjangan penelitian (research gap) terkait pelaksanaan administrasi kurikulum secara konkret di tingkat sekolah. Hasil analisis kemudian disusun secara naratif dan argumentatif untuk merumuskan rekomendasi bagi peningkatan kualitas administrasi kurikulum di masa depan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tren pelaksanaan administrasi kurikulum pada satuan pendidikan mulai meninggalkan pola administrasi berbasis dokumen fisik dan beralih ke sistem berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi perencanaan hingga evaluasi program pembelajaran. Implementasi Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar bagi sekolah dalam menyusun kurikulum operasional yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan.

Keberhasilan administrasi kurikulum sangat ditentukan oleh kapasitas kepala sekolah dalam melakukan supervisi dan memfasilitasi inovasi pembelajaran di sekolah. Administrasi kurikulum kini difokuskan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi (4C) guna menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Pelaksanaan administrasi kurikulum tidak hanya menasar aspek kognitif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual (Imtaq) dan ilmu pengetahuan (IPTEK) secara holistik.

Pembahasan

Peralihan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka menandai pergeseran paradigma administrasi kurikulum dari yang bersifat kaku menjadi lebih adaptif dan inovatif. Temuan menunjukkan bahwa otonomi yang diberikan menuntut administrator sekolah untuk memiliki kemampuan manajerial yang lebih tinggi guna memanfaatkan fleksibilitas tersebut secara optimal demi kepentingan peserta didik. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa administrasi bukan sekadar pengelolaan dokumen, melainkan mencakup perencanaan dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh komponen kurikulum.

Tantangan di era Society 5.0 mengharuskan administrasi kurikulum terintegrasi dengan teknologi digital seperti big data dan kecerdasan buatan. Efektivitas proses pembelajaran sangat bergantung pada bagaimana sistem administrasi mampu memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa (student-centered learning). Dalam konteks ini, guru berperan penting tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pengembang kurikulum di tingkat kelas yang bertanggung jawab atas dokumentasi dan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tren administrasi kurikulum saat ini menunjukkan upaya sinkronisasi antara tuntutan global (digitalisasi dan kompetensi industri) dengan penguatan karakter lokal melalui integrasi nilai keagamaan. Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kesiapan stakeholder, terutama kepemimpinan instruksional kepala sekolah dan profesionalisme guru dalam mengelola administrasi pembelajaran yang transparan dan akuntabel.

5. KESIMPULAN

Administrasi kurikulum pada satuan pendidikan saat ini mengalami transformasi signifikan yang dipicu oleh perubahan paradigma pendidikan dari teacher-centered menuju student-centered learning. Pelaksanaan administrasi kurikulum tidak lagi terbatas pada pengelolaan dokumen administratif semata, melainkan telah berkembang menjadi sistem yang lebih fleksibel, adaptif, dan terintegrasi dengan teknologi informasi untuk menghadapi tantangan era Society 5.0 serta Revolusi Industri 4.0.

Transisi dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka memberikan otonomi yang lebih luas bagi satuan pendidikan dalam mengelola kurikulum operasionalnya, yang pada gilirannya menuntut kesiapan kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme pendidik sebagai pengembang kurikulum di tingkat kelas. Selain itu, tren administrasi kurikulum saat ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik yang mengintegrasikan kompetensi abad 21 dengan nilai-nilai karakter dan spiritualitas peserta didik.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dosen Pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan artikel ini. Tanpa dukungan dan motivasi dari beliau, artikel mengenai tren pelaksanaan administrasi kurikulum ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Darise, N. (2019). *Implementasi Kurikulum 2013 Revisi sebagai Solusi Alternatif Pendidikan di Indonesia dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0*. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 13(2), 49-68. <http://dx.doi.org/10.30984/jii.v13i2.967>
- Febriyenti, D., Putri, N., Asmendri, & Sari, M. (2023). *Perkembangan Kurikulum di Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 196-214.
- Firmansyah, H., Ramdhani, M. A., Haris, S., Suherman, A., & Septiana, N. (2023). *Proses Perubahan Kurikulum K-13 Menjadi Kurikulum Merdeka*. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(3), 1230- 1244.
- Nurwatin, N. (2022). *Pengaruh Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar dan Kesiapan Kepala Sekolah terhadap Penyesuaian Pembelajaran di Sekolah*. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 9(2), 472-487.
- Patimah, P. (2016). *Pendidik dalam Pengembangan Kurikulum*. *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 3(2), 147-161.
- Rifa'i, M. (2016). *Implementasi Pembelajaran Integrated antara Imtaq dan Iptek*. *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan*, 3(2).
- Sumantri, B. A. (2022). *Pengembangan Kurikulum di Indonesia Menghadapi Tuntutan Kompetensi dalam Perkembangan Era Society 5.0*. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 3011-3024.